

# Syarat Umum Perjanjian (SUP)



Tahun 2020

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
SYARAT- SYARAT UMUM PERJANJIAN (SUP) .....	3
PASAL 1 SYARAT–SYARAT PELAKSANAAN .....	3
PASAL 2 IZIN-IZIN .....	3
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN .....	3
PASAL 4 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA .....	5
PASAL 5 PELAPORAN INSIDEN SEKURITI .....	6
PASAL 6 PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN .....	6
PASAL 7 PAJAK DAN BEA MATERAI .....	7
PASAL 8 JAMINAN .....	7
PASAL 9 PENGAWAS PELAKSANA .....	8
PASAL 10 PROJECT MANAGER .....	8
PASAL 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA .....	8
PASAL 12 PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN .....	8
PASAL 13 KERUSAKAN DAN KERUGIAN .....	9
PASAL 14 PENGGANTIAN KERUGIAN .....	9
PASAL 15 RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAN DAN LAPORAN .....	10
PASAL 16 UJI-TERIMA DAN SERAH-TERIMA .....	11
PASAL 17 JAMINAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN .....	11
PASAL 18 DENDA .....	12
PASAL 19 PEMBEBASAN DENDA .....	12
PASAL 20 FORCE MAJEURE .....	12
PASAL 21 PEMUTUSAN PERJANJIAN .....	13
PASAL 22 PEMBATALAN PERJANJIAN .....	14
PASAL 23 PEMBERITAHUAN.....	14
PASAL 24 PENYELESAIAN PERSELISIHAN .....	15
PASAL 25 HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM .....	15
PASAL 26 ITIKAD BAIK .....	16
PASAL 27 TANGGAL PERJANJIAN MULAI BERLAKU EFEKTIF .....	16
PASAL 28 AMANDEMEN / SIDE LETTER .....	16

## SYARAT- SYARAT UMUM PERJANJIAN (SUP)

### PASAL 1

#### SYARAT – SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus mentaati :

1. Dokumen Pengadaan, Berita Acara Rapat Penjelasan, Risalah Klarifikasi Teknis yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, petunjuk teknis beserta perubahan-perubahannya apabila ada syarat-syarat dan ketentuan lainnya sepanjang sesuai dengan lingkup **Perjanjian**.
2. Segala petunjuk dan perintah atas dasar **Perjanjian** yang diberikan oleh Direksi Bank Aceh Syariah atau pejabat yang mewakili secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan.
3. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain, yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam **Perjanjian** .

### PASAL 2

#### IZIN IZIN

1. **PIHAK KEDUA** atas biaya sendiri wajib memperoleh semua jenis izin dari Pejabat yang berwenang tepat pada waktunya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan menurut **Perjanjian** ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**.
2. **PIHAK PERTAMA** sejauh mungkin akan membantu **PIHAK KEDUA** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh izin-izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

### PASAL 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Disamping ketentuan dan syarat - syarat dari pasal-pasal lain **Perjanjian**, maka hal-hal tersebut dibawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. Berhak untuk memasuki ruangan kerja atau bekerja dilokasi **PIHAK PERTAMA** dalam rangka menyelesaikan pekerjaan menurut **Perjanjian**.
  - b. Berhak untuk memperoleh informasi dan atau data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan menurut **Perjanjian**.
  - c. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian**.
  - d. Bertanggung jawab terhadap hak akses yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dipergunakan sesuai dengan batasan-batasan waktu dan batasan-batasan akses yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** .

- e. Bertanggung jawab atas kelengkapan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan benar-benar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan serta memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam **Perjanjian**.
- f. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** sampai dengan diterimanya hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- g. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian untuk kepentingan pihak lain, misalnya Data Nasabah, Ketentuan-ketentuan Bank, dan lain-lain yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia/OJK, kecuali dengan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- h. Berkewajiban untuk menyediakan serta menggunakan tenaga-tenaga yang baik dan cakap baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan pekerjaan menurut **Perjanjian**, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rapih, praktis efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis profesional.
- i. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dalam **Perjanjian**.
- j. Berkewajiban mengganti personil-personil **PIHAK KEDUA** yang dilibatkan dalam penyelesaian pekerjaan jika menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** tidak atau kurang ahli dalam bidang pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- k. Berkewajiban untuk tidak mengambil keuntungan dan kesalahan yang terlihat maupun dari penghapusan dari beberapa bagian dalam **Perjanjian**, jika **PIHAK KEDUA** menemukan kesalahan atau perbedaan, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan **PIHAK PERTAMA** untuk memutuskannya.
- l. Berkewajiban melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait baik internal maupun eksternal **PIHAK PERTAMA** dilokasi yang bersangkutan dalam upaya mendapatkan ketepatan hasil Pekerjaan.
- m. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian.
- n. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**.
- o. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melakukan pekerjaan Jasa sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pekerjaan dan Penyelesaian.

2. Disamping ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal-pasal lain **Perjanjian** ini, maka hal-hal dibawah ini menjadi hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan pekerjaan.
  - d. Berhak meminta secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti karyawan **PIHAK KEDUA** yang pekerjaan dan atau kegiatannya tidak memuaskan dengan alasan yang kuat dan **PIHAK KEDUA** harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan **PIHAK KEDUA**.
  - e. Berhak memeriksa dan atau merubah serta menyetujui rencana dan atau laporan sesuai dengan lingkup kerja yang ditetapkan dalam **Perjanjian** dengan memberitahukan sebelumnya kepada **PIHAK KEDUA**.
  - f. Berhak menggunakan hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang telah diserahkan untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** jika terjadi pembatalan **Perjanjian**, sepanjang hasil pekerjaan dimaksud telah dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
  - g. Memberikan Ijin masuk/keluar dan bekerja kepada **PIHAK KEDUA** dan pekerja-pekerjanya di lokasi-lokasi **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

#### PASAL 4

##### PENGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA

1. Dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** dan personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang tidak terbatas, yang secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK menggandakan dan atau menyebarluaskan setiap informasi kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, mengungkapkan perjanjian ini atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya, dan informasi yang disediakan oleh atau untuk dan atas nama BANK sehubungan dengan itu, kepada personal selain personal yang dipekerjakan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini. Pengungkapan kepada setiap personal **PIHAK KEDUA** tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari BANK menggunakan setiap dokumen atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada pihak lain kecuali diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

4. Dengan surat pemberitahuan tertulis, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi dimaksud maupun salinannya, dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
5. Kewajiban dimaksud Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pengadaan menurut Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **PIHAK PERTAMA**. Semua informasi yang diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dimaksud merupakan milik **PIHAK PERTAMA** dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 5

##### PELAPORAN INSIDEN SEKURITI

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk melaporkan terjadinya insiden sekuriti yang timbul akibat kesengajaan dan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** pegawai-pegawainya,pekerja-pekerjanya, ataupun orang yang bekerja untuknya dalam rangka pelaksanaan **Perjanjian**.
2. Insiden Sekuriti dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah penyalahgunaan hak akses yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap kerugian akibat terjadinya insiden sekuriti dimaksud ayat (1) Pasal ini.

#### PASAL 6

##### PERPANJANGAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud **Perjanjian** ini dapat di perpanjang:
  - a. Apabila fasilitas yang menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** menurut **Perjanjian** belum tersedia tepat pada waktunya.
  - b. Apabila ada perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk menunda sementara waktu pelaksanaan pekerjaan.
  - c. Terjadinya peristiwa/kejadian *force majeure* yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian pekerjaan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
2. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan mengemukakan alasan yang cukup kuat dan dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 2

(dua) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa yang dijadikan alasan dan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dimaksud **Perjanjian** ini, yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Side Letter* atau Amandemen yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

3. Apabila permohonan dimaksud ayat (2) SUP ini tidak diajukan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini, maka **PIHAK KEDUA** kehilangan haknya untuk memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.
4. Pemberian perpanjangan jangka waktu dimaksud ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan untuk menambah harga **Perjanjian**.

#### PASAL 7

##### PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Dalam jumlah Harga/Nilai Borongan/Pekerjaan dimaksud **Perjanjian** ini telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), pajak-pajak, biaya meterai dan biaya-biaya lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku, yang timbul akibat **Perjanjian** ini, oleh karenanya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk melunasinya kepada Pemerintah, khusus untuk Pajak Penghasilan akan dipotong langsung oleh **PIHAK PERTAMA** selaku Wajib Pungut (WAPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetorkan semua PPN yang lahir dari **Perjanjian** ini, dan bila terjadi keterlambatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyetoran PPN sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** wajib segera menyerahkan salinan tanda terima atau tanda bukti setor Pajak Penghasilan dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan kewajiban kepada Pemerintah berkenaan dengan pajak yang timbul dari **Perjanjian** ini.

#### PASAL 8

##### JAMINAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa Jaminan Bank dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional atau Bank Swasta Asing atau *Surety Bond* yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Jaminan dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Mempunyai masa berlaku sesuai dengan **peruntukannya**
  - b. Dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam **Perjanjian** ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA** dan atau pihak Bank atau Perusahaan Asuransi sebagai Penerbit Jaminan dimaksud, dan pencairannya dapat

dilakukan sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kalender sesudah masa laku Jaminan Pelaksanaan berakhir.

3. Jaminan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peruntukannya dan masa berlakunya.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 9

##### PENGAWAS PELAKSANA

1. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud **Perjanjian** ini akan dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah
2. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari PT. Bank Aceh Syariah, sepanjang petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah tersebut mengenai Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** menurut **Perjanjian**.

#### PASAL 10

##### PROJECT MANAGER

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Pimpinan sehari-hari pelaksanaan pekerjaan kepada seorang Project Manager yang ahli dan cakap, serta diberi kuasa penuh untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dan dalam setiap waktu kerja harus selalu ada ditempat kerjanya.
2. Penunjukan Project Manager oleh **PIHAK KEDUA** harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengawas Pelaksana.
3. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan wajib menyediakan tenaga kerja yang cakap atas persetujuan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sampai masa pelaksanaan pekerjaan berakhir. Penempatan tenaga kerja **PIHAK KEDUA** tersebut harus memenuhi Peraturan Tenaga Kerja dan peraturan- peraturan lain yang berlaku.
4. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** bahwa petugas pelaksana atau pekerja-pekerja yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** tidak cakap atau berbuat sesuatu yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** atau kepentingan umum, maka **PIHAK KEDUA** wajib segera **menggantinya** dengan yang lain dalam waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 11

##### PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. **PIHAK KEDUA** dilarang menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh pekerjaan sesuai **Perjanjian** kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.



2. Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan **Perjanjian** tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut serta Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka menjadi milik **PIHAK PERTAMA** .

## PASAL 12

### PEKERJAAN TAMBAHAN DAN KURANGAN

1. Setiap penambahan atau pengurangan terhadap Lingkup Pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah ada perintah secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sedangkan Jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam rincian harga dalam Lampiran **Perjanjian**.
2. Apabila harga satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam **Perjanjian** ini, maka akan dilakukan negosiasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan analisa harga satuan saat pelaksanaan Pekerjaan.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh **PIHAK KEDUA** atas setiap dan semua klaim untuk pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
4. Pembayaran atas Pekerjaan tambahan atau kurangan baru dapat dilaksanakan setelah Amandemen yang mengatur tentang Pekerjaan tambahan dan kurangan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila terjadinya Pekerjaan tambah kurang dimaksud disebabkan oleh kesalahan dari **PIHAK KEDUA**, maka disepakati hal-hal berikut:
  - a. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terjadi kekurangan material (volume), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memenuhinya dan semua biaya untuk penambahan material tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** (*Free of Charge/FoC*).
  - b. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terdapat kelebihan material (volume), maka pembayaran sesuai dengan material terpasang.

## PASAL 13

### KERUSAKAN DAN KERUGIAN

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengganti semua kesalahan dan atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Laporan-laporan atau kepentingan **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak melaksanakannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan **PIHAK KEDUA** yang belum dibayarkan **PIHAK PERTAMA**, senilai kerugian dimaksud.

2. Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.

#### PASAL 14

##### PENGGANTIAN KERUGIAN

Tanpa mengurangi ketentuan lain **Perjanjian** ini, **PIHAK KEDUA** harus memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** atau pihak lainnya dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/ tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai akibat dari kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan **Perjanjian** atau Perjanjian khusus lain terkait dengan **Perjanjian** ini.
2. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan **Perjanjian** ini, kecuali apabila terjadinya kerugian tidak disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Sehubungan dengan setiap klaim/tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** atau salah satu karyawan atau agen atau sub-kontraktornya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Atas cedera pribadi yang menimpa dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian untuk melakukan suatu tindakan baik karena kelalaian atau bukan dari **PIHAK KEDUA**, para karyawannya, agen atau Sub-Kontraktornya.

#### PASAL 15

##### RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN LAPORAN

1. Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus membuat rencana pelaksanaan pekerjaan untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan hanya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** diperkenankan menyimpang dari rencana pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
3. Atas pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan setiap paket/tahap pekerjaan dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
  - a. Laporan awal (*Inspection report*) yang memuat rencana dan langkah-langkah **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pekerjaan, yang harus mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kalender sejak berlakunya **Perjanjian** secara efektif.
  - b. Laporan bulanan yang memuat hasil unjuk kerja **PIHAK KEDUA** dan harus diserahkan pada setiap akhir bulan yang bersangkutan.

- c. Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil akhir keseluruhan pekerjaan.
4. Laporan tersebut ayat (3) butir c Pasal ini ditujukan kepada Pengawas Pelaksana.

#### PASAL 16

##### UJI-TERIMA DAN SERAH-TERIMA

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk meminta **PIHAK KEDUA** memperbaiki/ menyelesaikannya.
4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
5. Jika identitas Laporan tidak sesuai dengan Laporan dalam ruang lingkup Pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta **PIHAK KEDUA** melakukan pemeriksaan serta pengujian terhadap Laporan.
6. Jika laporan hasil Pekerjaan dianggap tidak memenuhi persyaratan Perjanjian maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak laporan tersebut.
7. Atas pelaksanaan serah terima laporan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
8. Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
9. **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan setelah :
  - a. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki Laporan – laporan keuangan jika terdapat perubahan-perubahan atau perbaikan yang dimintakan oleh Pihak Bank Indonesia / OJK (apabila diperlukan).
10. Jika Laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan.

#### PASAL 17

##### JAMINAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak

lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan perangkat dimaksud oleh **PIHAK PERTAMA** .

2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh hasil pekerjaan sesuai **Perjanjian** ini yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak melanggar Hak Patent atau hak lain yang dimiliki Pihak Ketiga.
3. Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan akan mengambil segala tindakan hukum yang perlu termasuk mewakili ke depan Pengadilan atau Lembaga lainnya.
4. Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) dan (2) Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh Badan apapun, maka **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa hasil pekerjaan tersebut tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

#### PASAL 18

##### DENDA

1. Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana disebutkan dalam **Perjanjian** dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam **Perjanjian** ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1<sup>o</sup>/<sub>oo</sub> (satu perseribu) dari jumlah harga Borongan untuk setiap hari kelambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah harga Borongan.
2. Jumlah dari denda tersebut ayat (1) Pasal ini akan dipotongkan secara sekaligus dari tagihan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** .

#### PASAL 19

##### PEMBEBASAN DENDA

**PIHAK KEDUA** dibebaskan dari denda apabila :

1. **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure*.
2. Kelambatan dimaksud disebabkan karena perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan pekerjaan.
3. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Side Letter/Amandemen ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 20

##### FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan diluar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan **Perjanjian**, yaitu :

- a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus lebih dari 7 (tujuh) Hari Kalender, tanah longsor dan wabah penyakit.
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, perang dan pemberontakan.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kalender sejak saat terjadinya, begitu juga saat berakhirnya *Force Majeure* dan dinyatakan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  3. Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
  4. Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban Para Pihak, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
  5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

#### PASAL 21

##### PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk **PIHAK KEDUA**, untuk memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut **Perjanjian** ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
  - a. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Kalender terhitung sejak **Perjanjian** ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut **Perjanjian**.
  - b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian *force majeure* yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) Hari Kalender secara terus menerus.
  - c. Apabila Jangka Waktu Penyelesaian/penyerahan Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini dilampaui lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender atau jumlah denda telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Borongan.
  - d. Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
  - e. Apabila Pekerjaan tertunda oleh **PIHAK KEDUA** lebih dari 1 (satu) bulan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian *Force Majeure*, tidak juga oleh karena kesalahan **PIHAK PERTAMA** atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
  - f. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf a. s/d e. ayat ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis **PIHAK KEDUA** tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

2. Untuk hal ikhwal pemutusan **Perjanjian** dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap **Perjanjian**, sehingga pemutusan **Perjanjian** dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Pengadilan, serta dengan ini **PIHAK KEDUA** menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
3. Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian** secara sepihak dimaksud Pasal ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**, kecuali pemutusan **Perjanjian** yang disebabkan ayat (1).b Pasal ini.
  - b. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan **Perjanjian**.
  - c. **PIHAK PERTAMA** hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang telah dinyatakan dalam BAST-2.
  - d. Tidak diikuti sertakan untuk mengikuti pengadaan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** selama 1 (satu) tahun.
  - e. Membayar Ganti Rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dan atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan dimaksud **Perjanjian** ini.
4. Dalam hal terjadinya pemutusan sebagian atau keseluruhan dari **Perjanjian**, kemudian **PIHAK PERTAMA** memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada pihak lain untuk meneruskan pelaksanaan Pekerjaan yang tidak ataupun belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** karena sebab dimaksud ayat (1) huruf a, c, d, e dan f Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kelebihan harga dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan **PIHAK KEDUA** apabila sisa pekerjaan dimaksud diserahkan **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain untuk menyelesaikannya atau apabila diselesaikan sendiri oleh **PIHAK PERTAMA**. Dengan ini **PIHAK KEDUA** memberi kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung jumlah biaya tersebut dari jumlah uang **PIHAK KEDUA** yang masih ada dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA** baik yang lahir dari **Perjanjian** ini maupun **Perjanjian** lainnya.
5. Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian**, ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud dalam **Perjanjian** yang telah atau belum dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** berwenang tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** untuk menetapkan bagian Pekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekuarangan pembayaran yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

6. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena putusanya **Perjanjian** ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 22

##### PEMBATALAN PERJANJIAN

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat, **Perjanjian** ini dibatalkan apabila :

1. Para Pihak terbukti melakukan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan **Perjanjian** ini.
2. Ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 23

##### PEMBERITAHUAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian**, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa pemberitahuan, pengumuman dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pelaksanaan **Perjanjian** akan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat yang akan ditetapkan dalam **Perjanjian**.

Alamat Pemberitahuan :

##### **PIHAK PERTAMA :**

U.p. : Iskandar  
Telp : 0651-22966  
Fax : 0651-6301072  
Email : divisi.umum@bankaceh.co.id  
Alamat : Jl. Dr. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh – Banda Aceh

##### **PIHAK KEDUA :**

Nama :  
Tel :  
Facsimile :

2. Pemberitahuan dimaksud ayat (1) Pasal ini akan berlaku efektif sejak diterima pemberitahuan tersebut oleh masing masing pihak.

#### PASAL 24

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian**, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari **Perjanjian** ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI.
3. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** .

#### PASAL 25

##### HUKUM YANG BERLAKU DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

1. **Perjanjian** ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang tidak dan atau belum di atur dalam **Perjanjian** ini tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi **Perjanjian**, termasuk namun tidak terbatas pada Hukum **Perjanjian** yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. **PIHAK KEDUA** harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan lainnya atau semua ketentuan hukum, setiap regulasi, ketentuan perundang-undangan dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan Pekerjaan, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari denda dan tanggung jawab atas pelanggaran semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh karyawan atau pekerjanya yang bekerja untuk melaksanakan isi dan ketentuan dari **Perjanjian** ini telah dipekerjakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang ketenagakerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaannya berdasarkan **Perjanjian** ini tidak akan menyebabkan terjadinya gangguan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. **PIHAK KEDUA** akan bertanggung jawab secara penuh apabila ternyata tindakan-tindakannya selama pelaksanaan **Perjanjian** ini melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya di bidang lingkungan hidup.



PASAL 26  
ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa pihaknya akan melaksanakan **Perjanjian** ini dengan itikad baik dan secara jujur dan mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Etika Bisnis. Tidak satupun ketentuan dan atau penafsiran atas ketentuan dalam **Perjanjian** ini atau ketidakjelasan dalam **Perjanjian** ini akan digunakan oleh salah Satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam **Perjanjian** ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu pihak.

PASAL 27  
TANGGAL PERJANJIAN MULAI BERLAKU EFEKTIF

Tanggal **Perjanjian** mulai berlaku secara efektif sejak tanggal **Perjanjian** ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 28  
AMANDEMEN / SIDE LETTER

Setiap perubahan isi **Perjanjian** ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap **Perjanjian** ini yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian** ini.